



Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Riana Mayasari

Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128, Indonesia

riana.mayasari@polsri.ac.id

doi.org/10.33795/jraam.v6i1.011

Informasi Artikel

Tanggal masuk	02-08-2021
Tanggal revisi	29-09-2022
Tanggal diterima	30-09-2022

Keywords

*Financial Reports Quality;
Internal Control;
Local Government;
Regression.*

Abstract

This study aimed to determine the effect of internal control on the financial report's quality. This research method was quantitative descriptive. Data were collected using documentation and literature study. This study used purposive sampling with total sample of 34 Local Governments on the Kalimantan Island. The data analysis technique used linear regression. The results of statistical tests showed that the internal control system had no significant effect on the quality of financial reports in regency/ city governments in Kalimantan.

Kata kunci

*Kualitas Laporan Keuangan;
Pemerintah Daerah;
Pengendalian Intern;
Regresi.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi literatur. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 34 Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Kalimantan.



1. Pendahuluan

Suatu pengendalian intern menjadi bagian dalam sistem pemerintahan yang terus di kembangkan secara berkelanjutan. Suatu sistem pengendalian pada internal organisasi menjadi bagian yang penting untuk dilihat pengaruhnya terhadap berbagai berbagai aspek termasuk Kualitas Laporan Keuangan (KLK) yang dihasilkan[1]. Kebijakan

Pemerintah ini juga mengakomodir Kepala Pemerintah Daerah untuk leluasa dalam melaksanakan pengelolaan terkait keuangan daerah dengan mandiri[2]. Proses pengelolaan keuangan Pemda adalah keseluruhan aktivitas yang terdiri dari perencanaan, penerapan, pengorganisasian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pada Pemda di

Indonesia[3]. Proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah wajib dikelola dengan penuh tanggungjawab untuk menciptakan sebuah pengelolaan keuangan dan anggaran yang sesuai dengan target[4]. Proses pengelolaan keuangan yang efektif di Pemda ditunjukkan melalui ketercapaian target serta tujuan dari pengelolaan keuangan yang dilakukan meliputi proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan peraturan.[5]

Suatu pengelolaan keuangan yang baik harus mampu menyajikan sebuah laporan keuangan yang berkualitas yang sinkron seperti kondisi nyata yang terjadi dalam institusi. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat diperlukan untuk mendukung proses pencatatan dan pengungkapan[6]. Hal ini bertujuan supaya laporan yang dihasilkan dapat memberikan suatu informasi yang memadai untuk pemangku kepentingan[7].

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai sebagian elemen yang berarti bagi pengelolaan akuntabilitas Pemerintah[8]. Elemen tersebut merupakan area dari pengendalian, efek dari pengendalian, aktivitas-aktivitas pengendalian, serta komunikasi. Salah satu elemen tersebut yaitu area pengendalian menjadi bagian dari elemen dasar untuk aktivitas operasional suatu entitas publik atau pemerintah yang baik[9]. SPIP seharusnya berkontribusi dalam membantu pengelola keuangan untuk melindungi aset organisasi; menjamin tersajinya sebuah laporan keuangan dan proses pengelolaan yang akurat serta bisa diandalkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya agar memiliki nilai yang ekonomis, efisien serta efektif[10]. Selain itu, SPIP juga sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan[11].

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut, didapatkan tujuan dari pelaksanaan penelitian yang akan disampaikan yaitu untuk melakukan analisis pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

yang yang dihasilkan Pemda Kabupaten/ Kota yang berlokasi di Pulau Kalimantan. Letak administratif Pemda Kabupaten/ Kota tersebut berada di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara), Kalteng (Kalimantan Tengah), Kalbar (Kalimantan Barat), Kaltim (Kalimantan Timur), Kalsel (Kalimantan Selatan).

2. Metode

Penelitian yang dilakukan ini berjenis kuantitatif. Pada riset ini, data sekunder menjadi pilihan jenis data yang diaplikasikan. Sumber data berasal dari kumpulan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) [12]. Variabel pada riset ini yakni SPIP dan KLLK Pemda. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini berfungsi mengungkapkan maksud dan tujuan penelitian, sehingga meningkatkan ketelitian, kredibilitas data dan hasil penelitian[13]. Pemilihan sampel ini dipilih berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan sehingga mampu mewakili populasi. Pemerintah Kalimantan Barat memiliki jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 14 wilayah, namun penelitian ini berfokus pada 9 kabupaten/kota, Sedangkan Pemerintah Kalimantan Tengah yang berjumlah 14 kabupaten/kota hanya akan difokuskan pada 5 Kabupaten/Kota saja, selain itu pada Pemerintah Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 Kabupaten/Kota, hanya akan difokuskan pada 9 Kabupaten/ Kota saja, sedangkan pada Pemerintah Kalimantan Timur yang mempunyai 10 Kabupaten/ Kota, pada penelitian ini akan difokuskan pada 6 kabupaten/ kota saja, sedangkan pada Pemerintah Kalimantan Utara yang berjumlah 5 Kabupaten/ Kota hanya akan difokuskan pada 5 Kabupaten/ Kota saja.

Metode Analisis Data menggunakan regresi linier. Metode ini memiliki fungsi dalam mengevaluasi dan membuat model hubungan diantara variabel yang diteliti[14]. Riset ini meliputi variabel bebas, yaitu SPIP

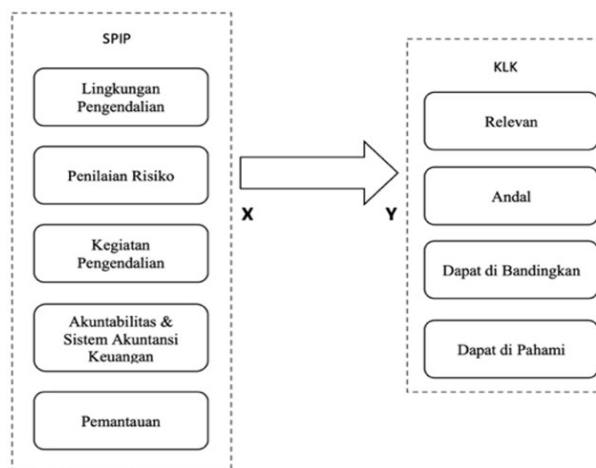
dengan sebutan variabel (X) serta variabel terikat, kualitas laporan keuangan (Y). Kualitas SPIP ini menggunakan 5 (lima) indikator dengan indeks kualitas SPIP. Sedangkan, untuk variabel KLK akan mengimplementasikan 4 indikator yakni, indikator relevan, indikator andal, indikator dapat diperbandingkan dan indikator dapat dipahami. Proses penganalisisan data dalam riset ini memakai SPSS yang termasuk dalam software statistika melalui uji asumsi klasik, diantaranya reabilitas dan validitas, analisis regresi linier, koefisien determinasi dan uji-t. Untuk mengukur validitas atau mengukur keabsahan kuesioner digunakan prosedur pengujian keabsahan data[15]. Konstruk yang baik pada proses pengujian validitas data yaitu apabila mempunyai muatan faktor minimal 0,30. Jika $a > 0,30$ maka, kondisi ini bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas terhadap penelitian ini menghasilkan *Cronbach Alpha*. Jika nilai $\alpha > 0,70$ pada hasil pengujian maka bisa dikategorikan reliabel. Uji statistik deskriptif ini menggambarkan data berdasarkan standar deviasi, varians, nilai rata-rata, jumlah, maksimal, rentang, nilai skewness serta kurtosis. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan akan mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemda.

Uji Regresi Linier. Regresi linier ini menggunakan persamaan umum $Y = a + bX$. Pada persamaan ini a dapat dikenal dengan sebutan intersep yang merupakan rerata nilai Y jika nilai $X=0$ [16]. Sedangkan, b sering disebut koefisien arah atau dapat disebut koefisien beta pada persamaan ini. Persamaan garis tersebut hanya memiliki 1 definisi fungsi yang bisa diturunkan dari 2 titik koordinat yang berlawanan, yakni titik (X_1, Y_1) serta (X_2, Y_2) . Dapat disimpulkan apabila terdapat persamaan lain untuk garis bentuk dapat diturunkan dengan menggunakan dua titik koordinat yang berbeda, yaitu dua titik yang tidak berhimpitan.

Rancangan uji hipotesis dilakukan untuk penetapan hipotesis penelitian nol (H_0) dan juga hipotesis penelitian alternatif (H_a) sebagai instrument penetapan tingkat signifikansi dan proses penarikan sebuah kesimpulan penelitian. Rancangan pengujian ini adalah melakukan pengujian terhadap tidak adanya pengaruh variabel penelitian independen (X) yaitu SPIP dan variabel penelitian dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan. Masing-masing hipotesis tersebut yaitu SPI tidak berpengaruh terhadap peningkatan KLK. Pengendalian internal juga mempengaruhi upaya peningkatan KLK yang dihasilkan oleh Pemda.

Riset ini menerapkan teknik analisis koefisien korelasi karena data bersifat ordinal. Persamaan korelasi yang dimasukkan akan menghasilkan koefisien $a = 0,05$. Ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pengendalian intern berpengaruh terhadap hipotesis (H_a) atau KLK diterima. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, SPI tidak memiliki pengaruh terhadap hipotesis (H_a) atau KLK akan ditolak.



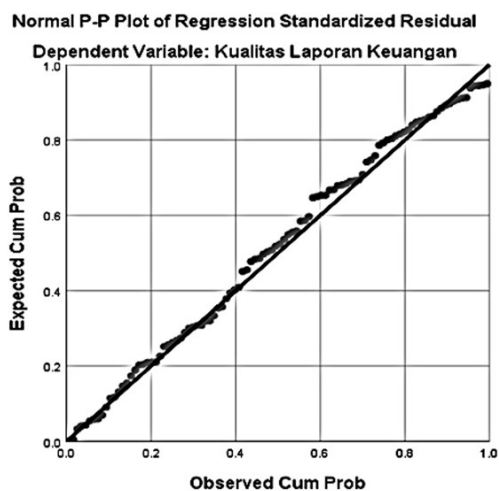
Gambar 1. Model Penelitian

Model riset ini menguji pengaruh dan kaitan variable penelitian independen X terhadap variable penelitian dependen Y. Penelitian ini menggunakan regresi[14]. Variabel penelitian X mengaplikasikan indikator Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Akuntabilitas, Sistem Akuntansi Keuangan hingga Pemantauan. Sedangkan, variable

penelitian Y terdapat indikator relevan, indikator andal, indikator bisa dibandingkan dan indikator mampu dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian asumsi klasik. Hasil Pengujian Normalitas Data Per Provinsi. Proses uji ini memakai analisis grafik serta bersumber pada grafik wajar yang disajikan pada Gambar 2. Hal ini ditunjukkan dengan garis putus-putus di dekat garis diagonal. Berdasarkan Gambar 1 dapat di-artikan jika model penelitian regresi cocok dengan anggapan normalitas. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram. Grafik pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pengujian normalitas data melalui grafik histogram menunjukkan tidak ada kecenderungan bentuk lonceng baik ke kiri maupun ke kanan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data hasil pengujian ini berdistribusi normal.



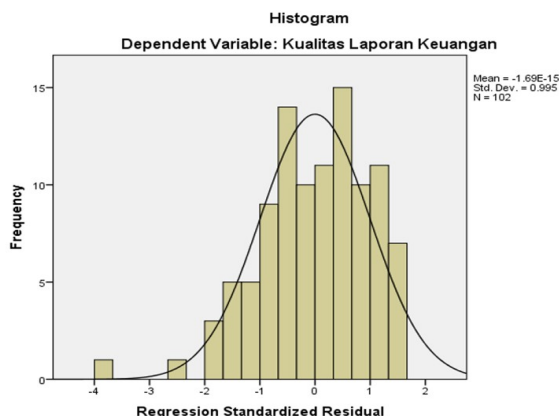
Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Data

Hasil uji heteroskedastisitas. Gambar 4 menyatakan jika sebaran pola tidak merata sehingga menunjukkan pola yang tidak beraturan. Maka, dari bentuk pola pada gambar tersebut diartikan jika tidak terdapat hubungan permasalahan terkait heteroskedastisitas pada regresi linier penelitian ini.

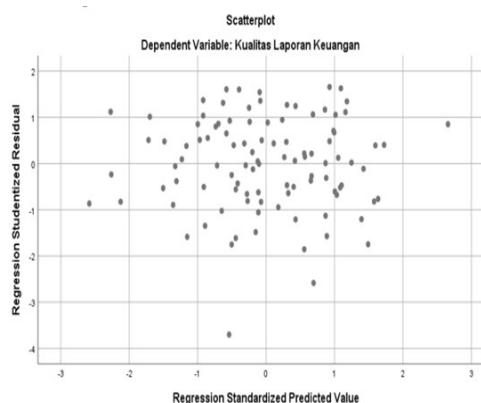
Hasil Pengujian autokorelasi. Konstanta sebesar 0,187 dapat dilihat dalam persamaan regresi pada Tabel 3. $Y = 61,752 + 0,222X$ Apabila nilai sistem pengendalian

intern (X) sama dengan nol, maka dapat disimpulkan bahwa KLIK Pemda adalah baik. Nilai koefisien regresi bertanda positif 0,187 menyatakan jika terdapat hubungan positif antara SPIP atau variabel penelitian (X) dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Y). Artinya, perbaikan SPIP dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara), Kalteng Kalimantan Tengah, Kalbar (Kalimantan Barat), Kaltim (Kalimantan Timur), serta Kalsel (Kalimantan Selatan).

Pada Tabel 3 terkait dengan analisis regresi pada Pemkot Provinsi Kalbar diperoleh hasil bahwa Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalbar memiliki *t* hitung sebesar 2,307 serta tingkat signifikansi yang dihasilkan yaitu $0,030 < 0,05$.



Gambar 3. Grafik Histogram



Gambar 4. Hasil Pengujian Data Heterokedastisitas

Hasil tersebut juga terkait dengan analisis regresi pada Pemda Kabupaten/ Kota

di KALSEL diperoleh hasil jika Pemda Kabupaten/Kota di KALSEL memiliki t hitung sebesar 1,221 serta tingkat signifikan yang dihasilkan yaitu $0,233 < 0,05$. Hasil analisis regresi pada Pemda Kabupaten/ Kota di KALTENG didapati hasil bahwa Pemda Kabupaten/Kota di KALTENG diperoleh t

hitung yakni 1,588 serta tingkat signifikan yang dihasilkan yaitu $0,136 < 0,05$. Hasil analisis regresi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kaltara pada tabel 8 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Kaltara memiliki t -hitung sebesar 1,898 berdasarkan analisis tersebut. Selain itu, tingkat signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar $0,080 < 0,05$

Tabel 1. Hasil uji auto korelasi

Model Summary(MS) ^b					
Model	R(MR)	R Square(RS)	Adjusted R Square(ARS)	Std. Error of the Estimate(SEE)	Durbin-Watson(DW)
1	.187 ^a	.035	.025	6.27262	1.375

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern(SPI)
 b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan(KLK)

Tabel 2. Hasil analisis regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta(SCB)	t	Sig.
	B(MB)	Std. Error(SE)			
1 (Constant)	61.752	9.700		6.366	.000
Sistem Pengendalian Intern(SPI)	.222	.117	.187	1.902	.060

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Pemda per Kabupaten/ Kota di Provinsi di Kalimantan

Provinsi	Hasil Analisis	
	t	Signifikansi
Kalbar (Kalimantan Barat)	2.307	.030
Kalsel (Kalimantan Selatan)	1.221	.233
Kalteng (Kalimantan Tengah)	1.588	.136
Kaltim (Kalimantan Timur)	.737	.472
Kaltara (Kalimantan Utara)	1.898	.080

Tabel 4. Hasil Analisis ANOVA Pemda Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	142.388	1	142.388	3.619	.060 ^b	
Residual	3934.572	100	39.346			
Total	4076.960	101				

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
 b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi

		SPI	KLK
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	1	.187
	Sig. (2-tailed)		.060
	N	102	102
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	.187	1
	Sig. (2-tailed)	.060	
	N	102	102

Uji Signifikansi Parsial (Uji t). Dalam mengetahui hubungan signifikansi variabel X dengan Y, maka menggunakan uji-t. H_0 dikeluarkan karena SPI (X) memiliki t hitung sebesar 1,902 serta tingkat signifikan $0,060 > 0,05$. Hasil menyatakan jika variabel SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap KLK Pemda Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara. Pengujian ini mengasumsikan bahwa pengendalian intern berpengaruh material terhadap KLK (tidak terbukti).

Uji Signifikansi Silmutan (Uji F). Analisis regresi bisa menjelaskan jika nilai F-hitung adalah 3,619. Nilai F-hitung 3,619 disebabkan karena tidak adanya pengaruh simultan antara variabel penelitian (X) yaitu SPIP dengan variabel penelitian (Y) yaitu kualitas informasi keuangan. Hasil riset yang dilakukan ini menyatakan gambaran bahwa SPIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada KLK. Tabel 5 membuktikan hal-hal berikut ini: (1) banyak data (n) berjumlah 102 unit, (2) hasil dari analisis koefisien korelasi pada variabel penelitian X (SPIP) serta variabel penelitian Y (KLK) sebesar 0,187 dengan nilai probabilitas untuk uji 2 pihak sebesar 0,060.

Pengukuran Probabilitas tidak menunjukkan memiliki hubungan antara variabel SPIP dengan variabel KLK dikarenakan besaran nilai yang dihasilkan sebesar 0,060. Sehingga tidak menunjukkan suatu hubungan antara SPIP dengan Kualitas Laporan Keuangan secara signifikan.

Pembahasan. Pada proses analisis data diatas menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa korelasi determinasi menunjukkan tidak ada hubungan di antara variabel penelitian X dengan variabel penelitian Y [17]. Interpretasi SPI atas PP No. 60 Tahun 2008, ialah proses integral dari aktivitas yang dilaksanakan pimpinan organisasi pemerintah terhadap struktur dibawahnya untuk menciptakan keyakinan atas sasaran-sasaran organisasi berasal dari aktivitas yang efisien dan efektif, keandalan atas hasil pelaporan keuangan, serta

kepatuhan akan aturan yang berlaku [18]. Hasil riset ini dapat dikatakan jika tidak memiliki kesamaan terhadap peraturan dan perundang-undangan saat ini.

Hasil analisa data pada Pemda Kabupaten/ Kota Provinsi KALBAR memiliki t hitung 2,307 dan tingkat signifikan $0,030 < 0,05$. Maka, variabel SPI berpengaruh signifikan terhadap KLK. Riset ini sepeham dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh [19] dan [20]. Pada Pemda Kabupaten/Kota Provinsi KALSEL memiliki t hitung dengan nilai 1,221 dan tingkat nilai signifikansi $0,233 > 0,05$. Berarti, variabel penelitian X yakni SPIP tidak berpengaruh signifikan dengan variabel penelitian Y yaitu kualitas pelaporan keuangan. Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng memiliki t hitung senilai 1,588 dan tingkat nilai signifikansi $0,136 > 0,05$. Maksudnya, variabel penelitian X yaitu SPIP tidak berpengaruh signifikan dengan variabel penelitian Y yaitu kualitas pelaporan keuangan Pemda Kabupaten/Kota Kalimantan Timur memiliki t hitung dengan nilai 0,737 dan tingkat signifikansi $0,472 > 0,05$. Berarti, variabel penelitian X tidak berpengaruh signifikan dengan KLK. Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara memiliki nilai t hitung 1,898 serta tingkat nilai signifikan $0,080 > 0,05$. Maksudnya, variabel penelitian X yaitu SPIP tidak berpengaruh signifikan dengan KLK yang dihasilkan. Secara bersama-sama Pemda Kabupaten/ Kota di Kalimantan menyatakan jika variabel SPI berpengaruh namun tidak signifikan terhadap KLK dengan hasil $0,060 > 0,05$ untuk nilai signifikansi. SPIP berpengaruh tidak signifikan dengan KLK dikarenakan implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 yang belum maksimal. PP tersebut mengatur tentang SPIP dan implementasinya di Indonesia. Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 yang baik dapat berpotensi mencegah tindakan penyalah-gunaan wewenang dalam pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki perbedaan hasil dengan riset sebelumnya

yang pernah dilaksanakan [10], [21][22][20], namun penelitian ini memiliki hasil yang sejalan seperti riset yang dilaksanakan terkait kualitas laporan keuangan daerah di Pontianak [23].

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisa menunjukkan bahwa secara simultan SPI tidak berpengaruh secara signifikan dengan kualitas LKPD Kabupaten/ Kota di Kalimantan yaitu di Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Nilai variabel yang berdampak terhadap kualitas penyajian laporan keuangan hanya sebesar 2,5%. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh hubungan antara variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan lemah. Keterbaruan riset ini terletak pada penggunaan sampel yang besar untuk penelitian topik yang sama di Kalimantan.

Penelitian ini memiliki manfaat kontribusi dalam bidang akuntansi sektor publik. Riset ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah di Kalimantan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Penelitian dengan hasil yang serupa pernah dilakukan namun belum menggunakan populasi dan sampel Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada metode penilaian dan scoring data yang terbatas dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan akan dilakukan dengan cakupan penelitian dan sampel yang lebih luas.

Daftar Rujukan

- [1] Wang F, Xu L, Zhang J, Shu W. Political connections, internal control and firm value: Evidence from China's anti-corruption campaign. *J Bus Res* 2018;86:53–67. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.045>.
- [2] Ikyarti T, Aprila N. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *J Akunt* 2019;9:131–40. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>.
- [3] Defitri SY. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J Benefita* 2018;3:64–75. <http://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>.
- [4] Zeny Antika, Yunika Murdayanti, Hafifah Nasution. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *J Wahana Akunt* 2020;15:212–32. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>.
- [5] Utama DP. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. *J Appl Account Tax* 2020;5:101–6. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1449>.
- [6] Cilya DD, Rantelangi C, Kusumawardani A. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan terhadap opini audit atas laporan keuangan. *J Ilmu Akunt Mulawarman* 2018;2. <http://dx.doi.org/10.29264/jiam.v2i3.1213>.
- [7] Mursalim M, Sulastri S, Susanto E. Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Hadji Kalla Toyota. *YUME J Manag* 2021;4.

- <https://doi.org/10.2568/yum.v4i2.977>.
- [8] Arfiansyah MA. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal Islam Financ Accounting)* 2020;3. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>.
- [9] Handayani F, Sari DM, Yuniarti A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *J Ilm Akunt Dan Keuang* 2022;11:9–20. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>.
- [10] Aditya OR, Surjono W. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit Dan Perpajakan)* 2017;2:49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>.
- [11] Sunardi S, Lena NM, Febriantoko J. Comparison of Transparency Index Between Regency and City in South Sumatra and Lampung Province. *Ekuilibrium J Ilm ...* 2020;15:138–50. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v15i2.2603>.
- [12] Koziol N, Arthur A. An Introduction to Secondary Data Analysis. *Res Methodol Ser* 2012:51. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511618802.002>.
- [13] Campbell S, Greenwood M, Prior S, Shearer T, Walkem K, Young S, et al. Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *J Res Nurs* 2020;25:652–61. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>.
- [14] Ningsih S, Dukalang HH. Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura J Math* 2019;1:43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>.
- [15] Parjaman T, Akhmad D. Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Moderat J Ilm Ilmu Pemerintah* 2019;5:530–48. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3077>.
- [16] Zein SZ, Yasyifa LY, Ghozi RG, Harahap E, Badruzzaman FH, Darmawan D. Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. *Teknologi Pembelajaran* 2019;4. <https://doi.org/10.31980/tp.v4i1.529>.
- [17] Nduru RE, Situmorang M, Tarigan G. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi Di Deli Serdang. *Saintia Mat* 2014;2:71–83.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008.
- [19] Widari L, Sutrisno. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *J Ilm Ilmu Ekon* 2017;5:117–26.
- [20] S Purnomo B. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J Ris Akunt Dan Keuang* 2014; 2: 276. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>.
- [21] Yendrawati R. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating. *J Akunt Audit Indones* 2013; 17: 165–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>.
- [22] Mulia RA. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *J El-Riyasah* 2019;9:7–21. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>.
- [23] Winandria NT. Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Kasus Pada SKPD Dinas Kota

Pontianak). Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan.